

BAB I

PENDAHULUAN

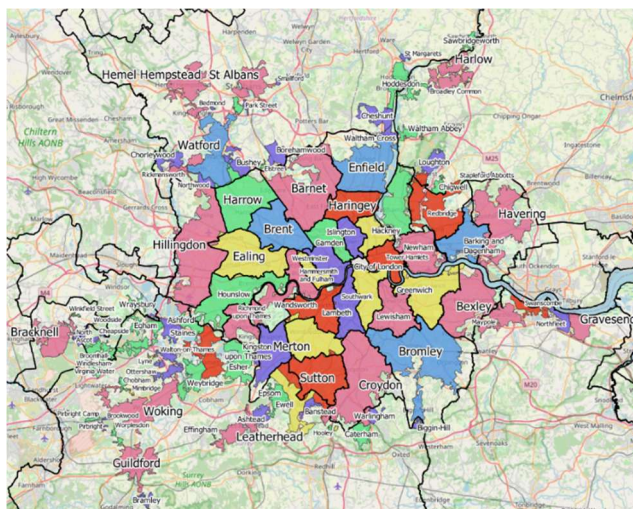
1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan sebuah elemen penting dalam pembentukan dan perkembangan suatu kawasan untuk beberapa tahun. Konsep mengenai perencanaan telah dikemukakan oleh para ahli yang berpendapat bahwasannya perencanaan merupakan sebuah langkah-langkah untuk tindakan pada masa mendatang lewat berbagai kegiatan dan usaha. Salah satu ahli bernama Peter F. Drucker (1954) berpendapat bahwa Perencanaan adalah proses berkelanjutan dalam membuat keputusan kewirausahaan saat ini secara sistematis dan dengan pengetahuan terbesar tentang masa depan mereka. Ini adalah proses persiapan untuk masa depan dengan memahami keadaan saat ini. Perencanaan merupakan elemen utama sebelum adanya tindakan dan memastikan bahwa tujuan tercapai (Edwards, 1986). Perencanaan ada pada setiap sektor mulai dari bisnis, ekonomi, operasional, lingkungan, perkotaan, wilayah, landscape, dan masih banyak lagi

Pada sebuah wilayah atau kota, konsep perencanaan diperlukan dalam menentukan indikasi program-program, rencana perkembangan mulai aktivitas kependudukan, industrial, maupun hal-hal lain yang ada dan menggerakkan sebuah wilayah. Perencanaan wilayah proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengubah suatu wilayah menjadi lebih baik. Perencanaan wilayah dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Di Indonesia, perencanaan wilayah merupakan langkah dalam menentukan manfaat dan kegunaan suatu ruang pada wilayah atau kawasan. Penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (UU 26 tahun 2007). Dalam penataan ruang dijabarkan pemanfaatan ruang merupakan elemen dalam perkembangan dan perencanaan wilayah. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Ukuran suatu perkotaan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk atau luas wilayahnya, tetapi juga oleh kompleksitas fungsi yang dijalankan serta tingkat keterkaitan sosial-ekonomi yang terbentuk di dalamnya. Semakin besar ukuran suatu kota, maka semakin tinggi pula intensitas interaksi dan pengaruh yang ditimbulkannya terhadap wilayah di sekitarnya. Kota besar cenderung menjadi pusat pertumbuhan yang memicu dinamika pembangunan di kota-kota satelit di sekitarnya, sementara pada saat yang sama, kota-kota penyangga tersebut memberikan kontribusi balik berupa dukungan tenaga

kerja, bahan baku, dan ruang aktivitas baru bagi kota induk. Pola saling ketergantungan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya sistem metropolitan, yaitu satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa kota dengan hubungan fungsional dan spasial yang kuat.

Bentuk dari kesatuan wilayah ini dirumuskan dan dikonsepsikan oleh beberapa pakar dan diimplementasikan langsung dalam wilayah. Sebuah konsep itu bernama metropolitan yakni suatu kawasan perkotaan besar yang terdiri atas inti kota (urban core) dan wilayah-wilayah sekitarnya yang saling terintegrasi secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Integrasi ini menciptakan sistem perkotaan yang kompleks dengan pergerakan penduduk, barang, dan jasa yang tinggi antar wilayahnya. (UU 26 tahun 2007). Salah satu konsep penerapan metropolitan pertama kali dikembangkan di Inggris, berawal dari Metropolitan London sebagai contoh klasik aglomerasi perkotaan yang tumbuh akibat ekspansi ekonomi dan urbanisasi yang tinggi di abad ke-19. “Greater London” merupakan bentuk kawasan metropolitan yang menjadikan London sebagai kota utama. Abad ke 18 Kota London terbentuk dari beberapa kawasan kecil dan klasik (medieval city), lalu seiring pertumbuhan pada abad ke 19 perkembangan kawasan ini mulai Nampak ditandai dari perkembangan kawasan pemukiman pinggir kota sampai masuk abad ke 20. Pada tahun 1965, konsep metropolitan Greater London ini ditetapkan dengan membentuk 33 kawasan urban yang terdiri atas 14 inner borough dan 19 outer borough (Britanica, 2019).



Gambar 1. 1 Peta London Metropolitan Area

Sumber: Wikipamia, 2025

Dari fenomena tersebut lahir pemahaman bahwa wilayah metropolitan bukan sekadar kumpulan kota secara fisik, tetapi sistem ruang yang terintegrasi dengan satu pusat kegiatan dominan dan wilayah penyangga yang memiliki fungsi pelengkap. Secara umum, suatu wilayah dapat disebut sebagai kawasan metropolitan apabila memenuhi beberapa syarat utama, seperti memiliki jumlah penduduk besar (umumnya lebih dari satu juta jiwa), keterpaduan kegiatan ekonomi antar kota, jaringan transportasi yang terhubung, serta intensitas mobilitas penduduk yang tinggi di dalam kawasan tersebut. Dalam konteks Indonesia, peran wilayah metropolitan menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.

Lebih lanjut di dalam perkembangan kawasan untuk menjadi sebuah metropolitan memiliki beberapa prasyarat. Dalam Peraturan Pemerintah nomer 26 tahun 2008 tentang Penataan Ruang dijabarkan beberapa syarat metropolitan antara lain:

- i. Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (1 juta) jiwa
- ii. Terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan di sekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan
- iii. Terdapat keterkaitan fungsi kawasan antarkawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan

Dalam syarat metropolitan di atas mendeskripsikan mengenai sebuah perkotaan inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya. Peran perkotaan inti di sini adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya, sedangkan “kawasan perkotaan di sekitarnya” merupakan kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan Kawasan Perkotaan Inti (Perpres 60 tahun 2022). Fungsi antar perkotaan yang berbeda di dalam kawasan metropolitan ini berfungsi agar meratanya perkembangan tiap perkotaan di dalam kawasan dan juga tidak bertumpunya sebuah kegiatan di suatu perkotaan saja. Namun pada beberapa kasus metropolitan di Indonesia terdapat ketimpangan dalam perencanaan pemusatan kegiatan di dalam kawasan metropolitan itu sendiri contohnya pada kota inti. Perkotaan inti sebagai pusat memang ditujukan sebagai pusat dari metropolitan dan juga pendorong kegiatan untuk sekitarnya, namun tidak semua sektor dapat dipusatkan di perkotaan inti karena nantinya dalam berkembangnya skala kegiatan metropolitan sebuah perkotaan inti tidak bisa menampung semua sektor sendirian. Oleh sebab itu, kajian perencanaan kawasan metropolitan perlu diadakan salah satunya untuk mengetahui karakteristik kegiatan apa

saja yang ada di kawasan tersebut dan perencanaan pengembangan kawasan metropolitan ini dapat tercipta dengan meminimalisir ketimpangan dan ketidakseimbangan di dalamnya

Pola mengenai pengembangan metropolitan salah satunya terlihat pada Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki kriteria yang mencukupi untuk menjadi sebuah kawasan metropolitan. Kawasan perkembangan Metropolitan Malang ini mencakup Kota Malang sebagai kota intinya, Kota Batu, dan wilayah penyangga seperti Lawang, Kepanjen, Tumpang, hingga Turen, menunjukkan dinamika urbanisasi yang semakin pesat. Kawasan ini berkembang menjadi pusat kegiatan pendidikan, pariwisata, dan industri, yang menarik arus migrasi penduduk dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Malang dan Kecamatan Sekitar

Penduduk Kota Malang dan Sekitar	
Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)
Kota Malang	889.359
Kepanjen	114.331
Lawang	112.538
Singosari	182.640
Karangploso	83.938
Dau	67.880
Wagir	89.170
Pakisaji	92.318
Tajinan	58.625
Tumpang	80.252
Pakis	151.867
Bululawang	73.231
Gondanglegi	89.703
Turen	124.894
TOTAL PENDUDUK	2.210.746

Sumber: BPS Kota Malang, BPS Kabupaten Malang (2024)

Fenomena mengenai metropolitan sepertinya tertampak pada kawasan Kota Malang dan sekitarnya. Kota Malang hingga tahun 2024 memiliki jumlah penduduk hampir 1 juta jiwa untuk wilayah delineasi kotanya sendiri dengan kawasan sekitarnya sebagai kawasan satelit yang jika digabungkan mencapai lebih dari 1 juta penduduk membuat kawasan ini benar-benar harus untuk dikaji mengenai kelayakan konsep metropolitannya serta bagaimana bentuk konsep dari fungsi-fungsi tiap perkotaannya sehingga dapat direncanakan perkembangan dan pergerakan untuk rencana Metropolitan Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena mengenai metropolitan di Kota Malang yang dikaji layak menjadi sebuah kawasan metropolitan baru di Indonesia memunculkan beberapa pembahasan yang menarik untuk dikaji untuk bagaimana rencana metropolitan ini dijalankan, sehingga telah dirumuskan beberapa rumusan masalah terhadap penelitian mengenai “Identifikasi Fungsi Perkotaan Untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Malang” sebagai berikut:

1. Wilayah mana yang untuk masuk Metropolitan Malang?
2. Bagaimana fungsi eksisting perkotaan di Metropolitan Malang saat ini?
3. Bagaimana arahan pengembangan fungsi perkotaan di dalam Metropolitan Malang?

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian berjudul “Identifikasi Fungsi Perkotaan Untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Malang” ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik, peran, dan jangkauan fungsi antar wilayah di kawasan Metropolitan Malang melalui identifikasi fungsi perkotaan di dalamnya serta memberikan arahan pengembangan wilayah metropolitan yang seimbang dan berkelanjutan.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Mengenai sasaran penelitian yang akan diteliti mengenai “Identifikasi Fungsi Perkotaan dalam Mendukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Malang” berikut ini adalah sasaran yang akan dicapai dalam penelitian kali ini, antara lain:

1. Mengidentifikasi wilayah yang masuk ke dalam Metropolitan Malang
2. Mengidentifikasi fungsi eksisting perkotaan pada wilayah Metropolitan Malang.
3. Memberikan arahan berkaitan dengan fungsi perkotaan yang ada di delineasi Metropolitan Malang.

1.4 Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian merupakan gambaran dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Lingkup penelitian ini terdiri atas lingkup lokasi penelitian dan lingkup materi yang akan dibahas dalam penelitian.

1.4.1 Lingkup Lokasi

Metropolitan yang merupakan kawasan yang terdiri atas sebuah perkotaan inti dengan perkotaan-perkotaan sekitarnya terbentuk atas hubungan saling butuh antar kota inti dan kota satelit maupun antar satelit dalam kawasan yang padu di dalam metropolitan itu sendiri. Bentuk dari hubungan dalam merencanakan sebuah kawasan metropolitan perlu diketahui agar untuk mengembangkan metropolitan tidak tertimpang perkembangan wilayah hanya pada kota inti dan dapat direncanakan apa saja jenis-jenis kegiatan yang akan dibagi pada tiap perkotaan di dalam metropolitan itu sendiri. Lokasi penelitian mengenai fungsi perkotaan ini adalah pada kawasan yang terdelineasi di dalam rencana Metropolitan Malang yakni pada Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah nomer 13 tahun 2017 tentang RTRWN dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomer 5 tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur. Kawasan Metropolitan Malang terdiri atas 3 daerah administratif yakni Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang dengan batas administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Pasuruan & Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur: Kabupaten Lumajang
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia
- Sebelah Barat: Kabupaten Blitar

1.4.2 Lingkup Materi

Pembahasan penelitian ini yakni mengenai seputar delineasi Metropolitan Malang yang sesuai dengan karakteristik Metropolitan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomer 26 tahun 2008 tentang Penataan Ruang, fungsi yang ada untuk tiap perkotaannya, hingga arahan. Ruang lingkup materi dari kajian ini untuk menjawab ketiga sasaran penelitian adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kajian teori dan konsep mengenai Metropolitan di Indonesia dan Metropolitan Malang

Tahap ini merupakan tahap awal dalam mendefinisikan Metropolitan Malang berdasar beberapa sumber kajian. Sumber kajian diambil melalui media massa, buku kajian mengenai metropolitan, dan beberapa peraturan pemerintah terkait dengan metropolitan, peraturan rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah terkhusus wilayah Malang dan sekitarnya. Dalam kajian ini akan menghasilkan hipotesis dari delineasi ideal untuk model Metropolitan Malang berdasarkan syarat wilayah menjadi Metropolitan berdasarkan PP no 26 tahun 2008.

2. Melakukan identifikasi mengenai fungsi perkotaan pada kawasan Metropolitan Malang

Tahap identifikasi dilakukan dengan menganalisa peraturan-peraturan ketataruangan terhadap tiap wilayah perkotaan di dalam Metropolitan Malang mengenai rencana untuk pusat kegiatan di dalam wilayahnya. Identifikasi fungsi ini akan didukung juga dengan data pendukung mengenai jangkauan layanan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh dari fungsi perkotaan.

1.5 Keluaran dan Manfaat

Pada sub bab ini dibahas dalam dua bagian pembahasan utama yaitu keluaran yang diharapkan dan kegunaannya. Keluaran yang diharapkan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran. Adapun kegunaannya adalah bagaimana keluaran yang dihasilkan benar-benar mempunyai manfaat lebih baik bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang lain.

1.5.1 Keluaran Penelitian

Keluaran dari penelitian ini yakni laporan mengenai Identifikasi Fungsi Perkotaan Untuk Mendukung Pengembangan Kawasan Metropolitan Malang.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan di tingkat kota. Selain itu harapan penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Untuk pemerintah dan akademisi bisa digunakan sebagai kajian atau bahan bantuan untuk kajian dalam merencanakan daripada rencana Metropolitan Malang.
2. Sebagai bahan untuk kajian kepada setiap pembaca mengenai keadaan rencana Metropolitan Malang Raya melalui identifikasi fungsi perkotaan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah penyusunan laporan ini. Maka dari itu perlu adanya penentuan yang baik agar laporan bisa terlampir secara terstruktur. Berikut sistematika penulisannya Pembahasan dan penulisan kajian penelitian ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan

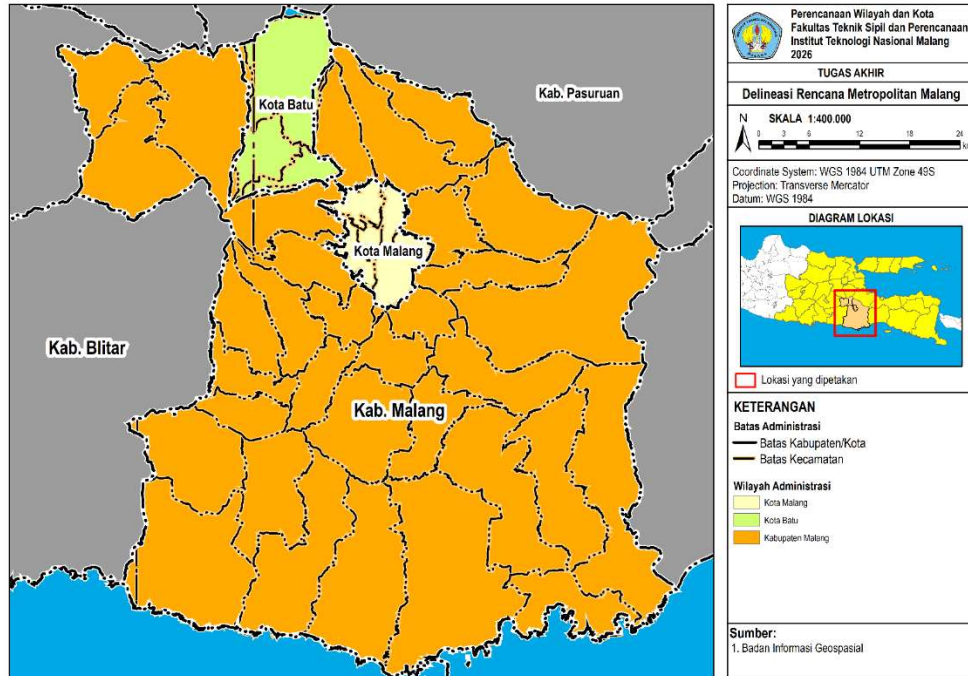
BAB II Kajian Teori, uraian berupa penjelasan tentang teori perkembangan kota, konsep metropolitan, teori transportasi, bentuk-bentuk transportasi, kajian mengenai bentuk sistem transportasi kota metropolitan, dan penelitian terdahulu

BAB III Metodologi, berisikan tentang metode pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam proses penyusunan laporan.

BAB IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian, menjabarkan tentang keadaan dan gambaran lokasi penelitian yang terbagi menjadi kondisi fisik wilayah, kondisi pergerakan, kondisi transportasi, dan gambaran lainnya yang ada di lokasi penelitian

BAB V Pembahasan, berisikan tentang hasil-hasil dari penelitian serta data-data yang diperoleh dari hasil survey dan menuliskan juga pembahasan dari hasil analisa yang telah dilakukan serta arahan untuk bentuk sistem transportasi umum yang layak digunakan untuk Metropolitan Malang

BAB VI Kesimpulan, berisikan kesimpulan dan juga saran yang mungkin diperlukan guna menyempurnakan laporan.



Peta 1. 1 Delineasi Rencana Metropolitan Malang

1.7 Kerangka Pikir Penelitian

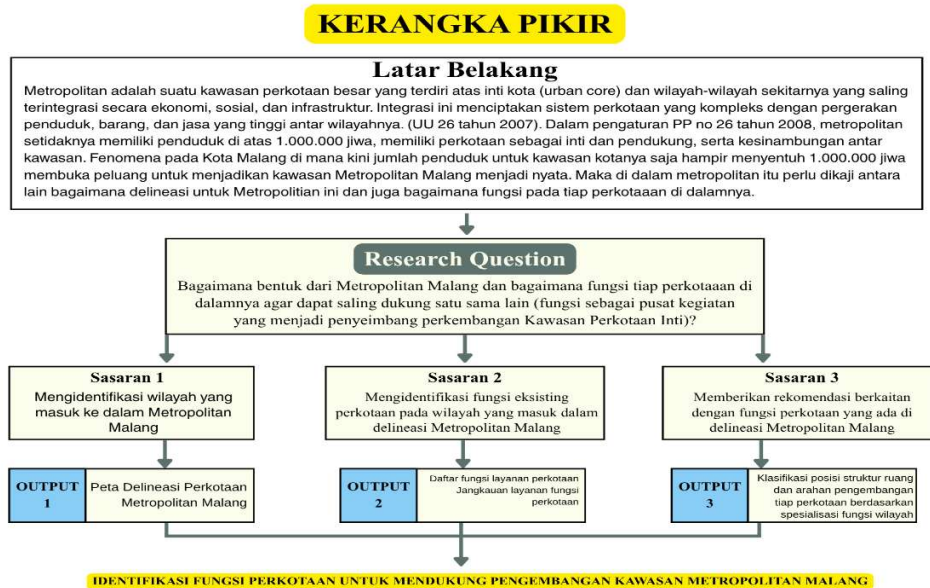


Diagram 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Kajian Penulis, 2026

